

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional dalam pengertian klasik. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem yang berlaku bagi keseluruhan individu yang berada di wilayah itu. Negara sebagai subjek hukum internasional haruslah memiliki penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat serta kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain sesuai Konvensi Montevideo 1933. Negara merupakan aktor dalam hubungan Internasional yang memerlukan hubungan dengan negara lain untuk melengkapi kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional ini kemudian menjelaskan mengapa suatu negara mengeluarkan kebijakan tertentu terhadap negara lain. Hubungan ini antar negara dilandaskan oleh adanya kebutuhan yang dimiliki oleh suatu negara. Kebutuhan negara secara garis besar dapat meliputi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik. Kebutuhan ekonomi diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ataupun negara sedangkan kebutuhan politik digunakan untuk menjembatani jalannya kebutuhan ekonomi, sebab tidak mungkin negara menjalani sistem perekonomiannya sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain.

Hubungan politik dan ekonomi ini dijembatani oleh suatu kerjasama internasional yang merupakan kondisi perwujudan masyarakat saling tergantung . Bentuk bentuk kerjasama ini dapat meliputi kerjasama bilateral, kerjasama

regional dan kerjasama multilateral. Salah satu bentuk kerjasama regional yang digagas cukup besar adalah *Belt and Road Initiative*.

*Belt and Road Initiative* merupakan suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi China Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas kerjasama antar negara negara Eurasia, terutama bagi Republik Rakyat China (RRC), Sabuk Ekonomi Jalur Sutera (SREB) berbasis daratan dan jalur Sutera Maritim (MSR) lintas Samudera. Selama menjabat sebagai presiden China, Xi Jin Ping mengeluarkan serangkaian kebijakan yang tergolong ambisius. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian dunia yaitu *Belt and Road initiative* (BRI) yang bertujuan sebagai penghubung ekonomi eurasia dibidang infrastruktur, perdagangan dan investasi. *Belt and Road Initiative* (BRI) terdiri dari 2 komponen utama yaitu *the silk road economic* dan *21<sup>st</sup> Century Maritim Silk Road*. Strategi tersebut menegaskan tekad China untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di China. Kebijakan luar negeri ini pertama kali disampaikan oleh presiden Xi Jinping pada akhir 2013 yang dapat dikatakan sebagai program pembangunan infrastruktur yang ambisius untuk menghubungkan wilayah perbatasan China yang kurang berkembang dengan negara tetangga.

Belt and Road Initiative atau yang disingkat dengan sebutan BRI dapat dikatakan sebagai upaya China untuk memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspor barang-barang manufaktur China. Kebijakan luar negeri yang dinamakan BRI ini yang digagas oleh China telah memperkuat kesan ini

proyek didorong oleh tujuan geostrategis yang luas. Terlihat dari beberapa elemen BRI yang digunakan untuk mendorong Ekonomi China, seperti proyek China – Pakistan adalah contoh utama. Secara luas dianggap sebagai salah satu proyek unggulan Belt and Road Initiative. Proyek ini diharapkan menghubungkan Kashgar di Xinjiang di ujung barat China dengan Pelabuhan Gwadar di provinsi Baluchistan. Mengingat kedekatan Pelabuhan Gwadar dengan Teluk Persia, tempat dapat digunakan sebagai titik transshipment bagi China. China meyakini kebijakan ini mampu memberi akses pasar ke negara berkembang seperti yang ditargetkan di bawah BRI. Proyek ini menghubungkan Kunming ke Thailand, Kunming-Vietnam-Kamboja, dan koridor Bangladesh-India-Myanmar. Sedangkan untuk jalur laut, pemerintah China menghubungkan jalur pelayaran historis mereka melalui Fujian ke Selat Malaka, Teluk Bengal, Laut Arabia, Terusan Suez dan Laut Tengah.


China beranggapan BRI akan memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan asal China untuk menjadi lebih kompetitif secara internasional. Upaya ini akan didukung oleh pemodal pemodal China yang sering mendesak penerima pinjaman untuk menerima barang buatan China sebagai syarat pemberian kredit. Kampanye Pemerintah China untuk memasarkan kereta api teknologi kecepatan tinggi mungkin adalah contoh bagaimana ia bermaksud menggunakan BRI untuk meningkatkan industri China.

Beijing menganggap teknologi kereta api berkecepatan tinggi sebagai salah satu dari itu perhiasan mahkota dari industri manufaktur maju. Pemerintah

China telah mengerahkan lebih dari 10.000 ilmuwan dan insinyur untuk menggabungkan teknologi asing yang kemudian diimpor dan dikembangkan di negara sendiri. Hasil dari upaya ini terbukti memiliki perkembangan yang menakjubkan dari Sektor kereta api kecepatan tinggi China. Yang membuat negara China menjadi rumah Produksi bagi lebih dari 50 persen dari total kereta api berkecepatan tinggi yang dibangun di seluruh dunia. Perdana menteri Li Keqiang secara pribadi memasarkan proyek kereta api berkecepatan tinggi tersebut ke Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Semua negara ini dianggap sebagai mitra strategis dalam proyek Belt and Road Initiative. berbeda dengan kawasan Asia Tenggara, respon kebijakan BRI di daerah Asia Selatan cenderung lebih berbeda melihat negara negara seperti India dan Bangladesh yang lebih cenderung mengandalkan proyek proyek kerjasama dengan Jepang . Hal ini dibuktikan dengan sikap India yang lebih cenderung terbuka pada proyek PQI (Partnership for quality Infrastructure) Jepang dibandingkan proyek BRI China. Alasan utama India lebih cenderung memilih Jepang dibandingkan China dikarenakan BRI China terlihat lebih mengintervensi India di wilayah Asia Selatan. India dalam hal ini merupakan bagian dari *emerging power* di Asia selain Jepang yang menyaingi China. Selain itu kemitraan India - Jepang menjadikan India sebagai penerima yang besar program ODA (Official Development Assistance) yang sebagian besar dana tersebut juga digunakan sebagai pembangunan proyek kereta api India.

Tak hanya itu, Bangladesh baru baru ini juga beralih ke Jepang dalam pembangunan infrastrukturnya. Hal in terlihat pada tahun 2015 JICA (Japan

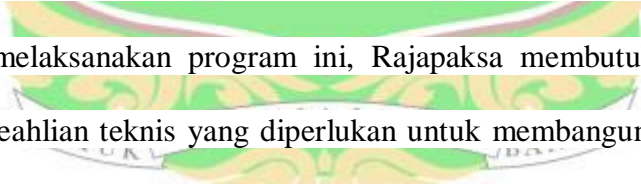
International cooperation Agency) menawarkan kepada Bangladesh pinjaman sebanyak 3,7 milyar dolar dengan persyaratan mudah dengan tingkat bunga 0,1 persen selama tiga puluh tahun dengan masa tenggang sepuluh tahun untuk pembangunan empat pembangkit listrik tenaga batubara yang masing masing 600 MW dan kompleks pelabuhan Matarbari di bagian Tenggara. Sedangkan Pakistan terlihat lebih memihak kepada China daripada Jepang sehingga memicu keselarasan strategis antara Jepang-India-Bangladesh berhadapan dengan China-Pakistan-Sri Lanka. Kedekatan antara Pakistan dan China semakin terlihat dengan adanya proyek kerjasama antara kedua negara di bidang infrastruktur bernilai milyaran dolar dibawah Belt and Road Initiative (BRI). Hal tersebut disampaikan oleh perdana menteri Pakistan Imran Khan dalam acara pembukaan China International Import Expo (CIIE) pertama di Shanghai, China pada 5 November 2018. Tak hanya itu, China dan Pakistan sebelumnya diketahui juga sudah menjalin kerjasama String of Pearl yang merupakan kerjasama dalam upaya peningkatan akses pelabuhan dan bantuan udara. Adapun tujuan utama dari string of pearl adalah :

- 
1. Energy-shipping minyak dan gas
  2. Kelancaran jalur perdagangan Internasional
  3. Secara politik dan militer menjamin kepentingan di kawasan BRI .

Strategi ini ini merupakan strategi kebijakan luar negeri China yang bentuk kerjasamanya sendiri merupakan dalam bentuk investasi China dalam pelabuhan dan Pipeline di Gwadar.

Selain melakukan kerjasama dengan Pakistan, Sri Lanka juga ikut serta dalam proyek Belt and Road initiative (BRI) dengan China yang disepakati dalam String of Pearl. Kerjasama kedua negara ini didalam String of Pearl dimana Sri Lanka merupakan sebuah pulau yang terletak di tenggara India, yang berada kurang lebih 32 mil dari lepas pantai India bagian Selatan , India dan barat daya teluk Benggala serta di sebelah tenggara laut Arab. Sri Lanka berbatasan dengan India sebelah barat laut dan utaranya, sedangkan sebelah barat dayanya berbatasan dengan Maladewa. Diketahui bahwa China telah memberikan pinjaman senilai 1,2 miliar US \$ kepada Sri Lanka, menjadikannya penerima terbesar ketiga dari dana China dari negara-negara Belt and Road Initiative setelah Pakistan dan Rusia. Baik peningkatan substansial dalam jumlah utang ke China oleh Sri Lanka dan penyewaan pelabuhan Hambantota ke konsorsium yang dipimpin China telah memicu perdebatan sengit tentang efek dari keterlibatan keuangan China di negara-negara Silk-Road. Beberapa negara melihat keterlibatan keuangan ini sebagai upaya China untuk meningkatkan pengaruh politik dan militernya di wilayah tersebut melalui apa yang disebut diplomasi perangkap utang atau “ *Debt Trap Diplomacy*”. Selain itu, utang publik Sri Lanka mencapai 77% dari PDB-nya, menjadikannya yang paling berhutang di antara negara-negara tetangga lainnya seperti India, Malaysia, Pakistan, dan Thailand. Ini semua menunjukkan bahwa Sri Lanka memiliki masalah utang yang tergolong serius ke China. Memang, pinjaman terbaru China ke Sri Lanka dimaksudkan untuk melayani sebagian utang kepada kreditor lain. Sebelumnya, Sri Lanka menerima sejumlah besar bantuan pembangunan dari Barat selama Perang Dingin .

Tiga faktor utama mengikis kekuatan Barat sebagai kreditor selama periode pemerintahan Rajapaksa: krisis keuangan internasional, transisi Sri Lanka dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan menengah ke bawah dan semakin renggangnya kekuatan Barat pada pemerintahan Mahinda Rajapaksa. Dalam konteks ini, negara Sri Lanka terpaksa mengandalkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk membantu keuangan dari Beijing dengan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan Barat yang bersedia memberikan bantuan keuangan sebelumnya. Dengan demikian, China menjadi sumber pendanaan baru yang menarik, terutama bagi pemerintah yang ingin membuktikan kepada rakyatnya bahwa ia dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi negara itu setelah perang saudara. Untuk tujuan ini, Presiden Rajapaksa mengadopsi program ekonomi yang sepenuhnya sejalan dengan visi Beijing, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai langkah pertama untuk menarik investasi asing dan mendorong pembangunan sosial ekonomi lokal.



Untuk melaksanakan program ini, Rajapaksa membutuhkan pendanaan eksternal dan keahlian teknis yang diperlukan untuk membangun infrastruktur di bidang-bidang penting seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Karena Barat kehilangan minat terhadap Sri Lanka, China berada dalam posisi untuk memenuhi peran tersebut. Contoh China Merchants Port Holdings adalah ilustrasi yang sempurna. Sebagai perusahaan China milik negara, ia memiliki akses ke pendanaan yang lebih murah daripada yang tersedia untuk perusahaan swasta Barat. Banyak sarjana yang berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh

China ini adalah sebagai upaya China untuk meningkatkan ekspor dalam negerinya dan memperkuat ekonomi China, hal ini terlihat dari pertama, ruang lingkup kebijakan ini yang tidak terbatas. China mengumpulkan beberapa lusin negara yang secara sukarela setuju untuk bekerja sama, selain itu koordinasi kebijakan ini tidak hanya terbatas di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup keamanan internal, ilmu pengetahuan dan pertukaran budaya.

Lalu pertanyaannya disini adalah apakah Belt and Road Initiative merupakan akses penguat koridor ekonomi seperti yang disampaikan China ataukah sebagai alat politik China? Banyak negara peserta BRI memiliki ekonomi rendah ataupun berkembang. Program pembangunan infrastruktur global besutan pemerintah China yaitu Belt and Road Initiative menimbulkan kekhawatiran menjadi proyek yang ditunggangi untuk kepentingan militer dan politik. Belt and Road Initiative adalah jaringan informal negara negara yang bersepakat berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang tidak mengikat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang sebagian besar didanai oleh China. Selain itu Lembaga riset Amerika Serikat C4ADS (Center for Advanced Defense Studies) menilai proyek yang bernilai triliunan yang diikuti oleh 71 negara ini semata hanya untuk membangun ekonomi saja. Hasil riset menyimpulkan bahwa proyek proyek ini di dorong oleh kesepakatan ekonomi yang tidak saling menguntungkan bagi negara penerima seperti yang di sampaikan oleh China. Selain itu, hal yang menjadi kontradiktif yaitu bagaimana akuisisi pelabuhan hambantota yang dianggap lebih menguntungkan pihak China bertolak belakang dari hukum



Internasional. Piagam CERDS (Charter of Economic Rights and Duties of States) yang merupakan Piagam yang mengatur hak hak dan kewajiban negara di bawah naungan PBB menegaskan bahwa:

*Chapter 8 :*

*States should be co-operated in facilitating more rational and equitable international economic relations and in encouraging structural changes in the context of a balanced world economy in harmony with the needs and interest of all countries, and should take appropriate measures to this end.*

Pasal tersebut mensyaratkan negara untuk:

1. Bekerja sama dalam memperlancar hubungan ekonomi internasional yang lebih rasional dan adil; dan
2. Menggalakkan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomian dunia yang harmonis sesuai kebutuhan dan kepentingan semua negara, khususnya negara yang sedang berkembang.

Menurut piagam CERDS, negara-negara maju harus bekerja sama dengan negara-negara sedang berkembang dalam membentuk, memperkuat dan membangun infrastruktur dan penelitian ilmu pengetahuan guna membantu perluasan dan peningkatan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang.

Pasal 9 kembali mempertegas bahwasannya semua negara memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dalam lapangan ekonomi, sosial dan budaya, ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan tingkat ekonomi dan sosial di seluruh dunia, khususnya, sekali lagi, bagi negara negara sedang berkembang. Hal tersebut tentu menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap proyek yang ditunggangi oleh China ini, yang sebagian besarnya berada di kawasan Samudera Hindia. Beberapa negara barat menuduh BRI sebagai upaya memajukan geopolitik ataupun bentuk neokolonial Beijing. Persoalan yang timbul adalah kewajiban setiap negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang terkesan sebagai sebuah "Alternative Policy". Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun bantuan asing yang tidak memiliki unsur kepentingan. Kedua hal diatas merupakan suatu hal yang wajar, tetapi asas mutual benefit tetap harus menjadi tujuan utama. Tulisan ini akan mencoba memuat sejauh mana asas-asas tersebut ada dalam konsep BRI kerjasama yang dilakukan China dengan mitranya. Pada kasus Hambantota sebagai sebuah proyek kerjasama China-Sri Lanka berakibat pelabuhan tersebut seperti lepas dari kontrol/kedaulatan Sri Lanka. Adakah yang dilakukan China sebagai sesuatu yang bernama *deft trap diplomacy*? Berdasarkan paparan diatas penulis berminat untuk medalami dengan rumusan masalah sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi hal hal yang

akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai tujuan penelitian. Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Investasi China melalui Belt and Road Initiative tersebut dapat berakibat hilangnya kebebasan Sri Lanka terhadap proyek Pelabuhan Hambantota?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis kebijakan Belt and Road Initiative China terhadap perdagangan di Asia Selatan?
3. Bagaimana status hukum Belt and Road Initiative China dalam Proyek pelabuhan Hambantota?

### **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi kebijakan Belt and Road Initiative China terhadap perdagangan di Asia Selatan.
2. Untuk mengetahui status hukum kebijakan Belt and Road Initiative dalam Proyek pelabuhan Hambantota.

3. Untuk mengetahui apakah Investasi China melalui Belt and Road Initiative tersebut dapat berakibat hilangnya kebebasan Sri Lanka terhadap proyek Pelabuhan Hambantota.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan skripsi yang dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis

- A. Untuk memperkaya pengetahuan tentang Konsekuensi Yuridis kebijakan Belt and Road Initiative China terhadap perdagangan di Asia Selatan
- B. Untuk mengetahui status hukum Belt and Road Initiative China dalam Proyek pelabuhan Hambantota.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak pihak yang berkepentingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji suatu gejala. Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu metodologi. Metodologi merupakan suatu pedoman tentang

cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti di dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan mudah ditelaah permasalahan yang harus diselesaikan dalam penelitian sehingga tidak mengarah pada hal hal di luar konteks penelitian. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah konsekuensi yuridis Belt and Road Initiative China dalam Perdagangan Internasional di Asia Selatan.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal dan non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum doktrinal atau biasa juga disebut penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup inventarisasi hukum positif, asas asas hukum, sistematika peraturan perundang undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan dan doktrin doktrin hukum dari para ahli

hukum sesuai bidang yang dikaji. Metode penelitian ini juga ditekankan pada proses penelusuran data atau informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi.

### 3. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai suatu penelitian yang bersifat preskriptif, penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Didalam penelitian ini bagaimana konsekuensi yuridis Belt and Road Initiative China dalam Perdagangan Internasional di Asia Selatan.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data hukum sekunder memiliki karakteristik :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka;
- b. Bentuk maupun data sekunder telah dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu;

- c. Data sekunder tidak terikat dan dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tidak diperoleh langsung oleh sumbernya melainkan di dapatkan dari bahan pustaka, dan dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku buku teks mengenai pengaturan dan hukum perdagangan internasional
- b. Jurnal jurnal hukum mengenai prinsip Belt and Road initiative
- c. Hasil penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Belt and Road initiative terhadap perdagangan Internasional di Asia Selatan;
- d. Artikel artikel terdahulu tentang Belt and Road initiative .

#### 5. Sumber Data

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan mengenai masalah hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber sumber hukum yang diajukan dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber sumber hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

Piagam CERDS (Charter of Economic Rights and duties of States)

b. Bahan Hukum Sekunder

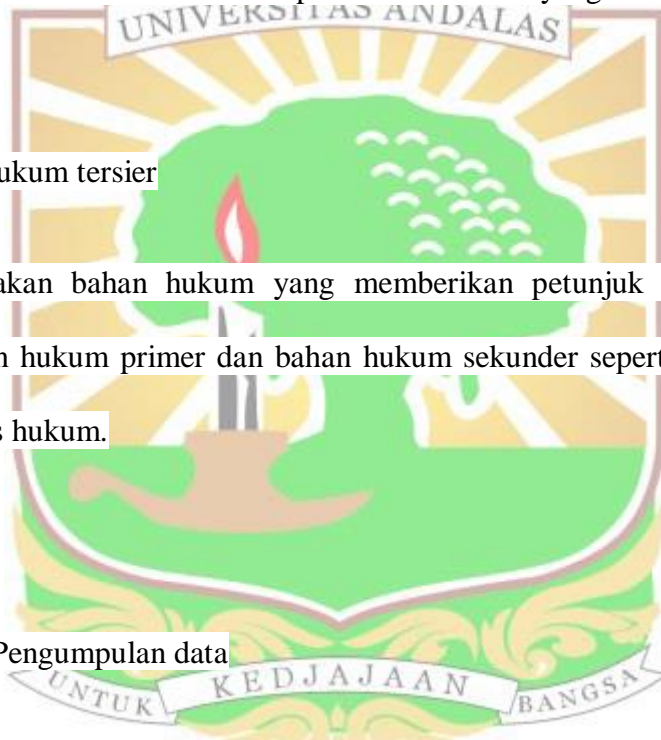
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku buku, jurnal hukum, teks, dokumen dokumen, tulisan tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang di dapat dari studi kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa ataupun kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal dimaksudkan agara data tersebut memilki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazim terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data





yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. Inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum internasional dan doktrin-doktrin dari para ahli.
- b. Mengkaji doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terkait Belt and Road initiative China dalam perdagangan Internasional di Asia Selatan

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang dibuat ini terdiri dari empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang didalamnya dibahas tinjauan umum tentang tinjauan umum Konsekuensi Yuridis Belt and Road initiative China dalam perdagangan Internasional di Asia Selatan.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyangkut mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai latar belakang,

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan skripsi ini.

